

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian suatu negara dan telah yang menjadi perbincangan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat awam, politikus, hingga para akademisi. Berbagai pendapat tentang kemiskinan bermunculan, baik yang pro ataupun yang kontra, dimulai dari konsep kemiskinan, penyebab, dampak, cara mengukur, hingga cara mengatasi kemiskinan itu sendiri.

Permasalahan yang terjadi dalam perekonomian suatu negara seperti kemiskinan akan menjadi permasalahan yang krusial, terutama di negara kurang berkembang dan negara berkembang seperti di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya menjadi bahasan masalah bagi negara kurang berkembang dan negara berkembang saja, kemiskinan juga menjadi bahasan masalah bagi negara-negara maju karena kemiskinan juga melanda negara-negara maju diseluruh dunia. Permasalahan kemiskinan di suatu negara perlu diperhatikan secara mendalam karena kemiskinan akan mengakibatkan sulitnya masyarakat suatu negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Definisi kemiskinan yakni kualitas hidup yang rendah atau kondisi ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam mencukupi kebutuhan

pokoknya. Kondisi ini dapat diidentifikasi dengan tingkat pendapatan yang rendah sehingga seseorang tidak mampu untuk mencukupi standar kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Kemiskinan dapat dikategorikan sebagai fenomena multidimensi yang dapat diukur dengan banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan diukur dengan menggunakan tolak ukur kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi. Seseorang dapat dikatakan miskin apabila seseorang tersebut berada dibawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati.

Menurut Maipita, I (2014: 3) penyebab kemiskinan dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, tetapi secara garis besar kemiskinan dapat ditimbulkan oleh adanya perbedaan, baik perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan maupun perbedaan sumberdaya. Kemiskinan jika dilihat dari dampaknya dapat menimbulkan suatu kondisi dimana seseorang atau masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasarnya, sehingga seseorang atau masyarakat tersebut dikatakan tidak mampu untuk mencapai standar kebutuhan hidup yang layak dan akan mengakibatkan persoalan sosial dan ekonomi.

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja, keterbatasan dan sulitnya akses terhadap kepemilikan modal, rendahnya tingkat penguasaan teknologi, penggunaan sumber daya

yang tidak efisien dan tingginya pertumbuhan penduduk (Sharp *et al.* dalam Maipita. I, 2014).

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dari sisi ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya, dengan kata lain penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan adalah penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) adalah jumlah penghitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan meliputi 52 jenis komoditi, seperti padi-padian, umbi-umbian, buah-buahan, daging, ikan, telur dan susu, kacang-kacangan, sayuran, minyak dan lemak, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan juga kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan meliputi 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki grafik kemiskinan dari periode 2003-2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Kemiskinan D.I. Yogyakarta periode 2003-2018

No	Tahun	Kemiskinan (Ribu Jiwa)
1	2003	636.8
2	2004	616.2
3	2005	625.8
4	2006	648.7
5	2007	633.5
6	2008	608.9
7	2009	544.9
8	2010	540.5
9	2011	564.2
10	2012	565.7
11	2013	541.9
12	2014	532.5
13	2015	550.2
14	2016	494.9
15	2017	488.5
16	2018	460.1

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

Tabel 1.1 menjelaskan tentang jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Pada tahun 2006 jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 648.7 ribu jiwa dan angka tersebut menjadi yang tertinggi, sedangkan pada tahun

2018 jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka 460.1 ribu jiwa dan menjadi yang terendah selama periode 2003 sampai 2018. Jika dilihat secara menyeluruh pada periode 2003-2018, jumlah kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun meski tidak secara signifikan.

Penurunan dalam jumlah kemiskinan mengindikasikan bahwa pembangunan yang dijalankan disuatu wilayah membawa sebuah keberhasilan. Saat perekonomian di suatu wilayah dapat berkembang, tentu akan menambah pendapatan yang dapat dibelanjakan, yang jika dikelola dengan baik akan berdampak pada penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini berarti, pertumbuhan ekonomi memiliki andil yang penting dalam mengatasi penurunan jumlah kemiskinan (Kuncoro dalam Asrianti, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur dalam suatu pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan yang sangat erat dengan permasalahan kemiskinan, baik hubungan secara menyeluruh maupun hubungan secara individu pada sektor ekonomi.

Grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi di Daerah istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta
periode 2003-2018**

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2003	4,58
2	2004	5,14
3	2005	4,73
4	2006	3,69
5	2007	4,31
6	2008	5,02
7	2009	4,39
8	2010	4,87
9	2011	5,16
10	2012	5,32
11	2013	5,40
12	2014	5,18
13	2015	4,95
14	2016	5,05
15	2017	5,41
16	2018	7,50

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

Tabel 1.2 menjelaskan tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Perkembangan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2018

sebesar 7,50%, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2006 sebesar 3,69%. Jika dilihat secara menyeluruh pada periode 2003-2018, perkembangan pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami kenaikan meskipun tidak secara signifikan karena terjadi kenaikan dan penurunan di beberapa tahun tertentu.

(Maipita, I *et al.* 2010) pembangunan ekonomi jika dilihat dalam tatanan kebijakan dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian pertumbuhan dan pemerataan yang tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi saja, kemungkinan hanya akan menguntungkan sebagian dari masyarakat dan akan menyisihkan sebagian besar masyarakat yang miskin, sedangkan jika memprioritaskan pemerataan saja tanpa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, masyarakat tidak akan sejahtera karena hanya akan berputar pada pemerataan kemiskinan. Perlu adanya penyusunan kebijakan dalam perekonomian suatu wilayah untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan mengurangi kemiskinan (*pro-poor*).

Pelaksanaan pembangunan yang tepat akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan harapan dapat menanggulangi berbagai permasalahan dalam pembangunan serta sosial kemasyarakatan, seperti permasalahan kemiskinan. Aspek penting lainnya dalam melihat kinerja pembangunan selain pertumbuhan ekonomi adalah ketepatan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia sehingga akan menyediakan lapangan pekerjaan yang mampu untuk menyerap angkatan kerja yang tersedia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada

peningkatan produksi barang atau jasa yang dihasilkan dan akan membutuhkan jumlah pekerja yang semakin besar untuk dapat memproses hasil produksi tersebut. Hal ini dapat berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan akan menurunkan jumlah kemiskinan.

Pengangguran merupakan masalah utama yang dihadapi di kebanyakan wilayah. Pengangguran menjadi permasalahan sosial didalam masyarakat yang mayoritas hidup dalam perekonomian menengah ke bawah dan akan menyebabkan produktivitas serta pendapatan masyarakat menjadi berkurang sehingga akan menimbulkan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, tingkat urbanisasi yang tinggi, ketidakmampuan pemerintah serta sektor swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang seimbang serta banyaknya pencari kerja yang yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya pengangguran di suatu wilayah.

Menurut Sukirno, S dalam Susiatun, E (2018) pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang tergolong ke dalam golongan angkatan kerja dan berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperoleh pekerjaan. Seseorang atau sekelompok orang yang sedang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak termasuk ke dalam golongan pengangguran.

Tabel 1.3 Jumlah Pengangguran D.I. Yogyakarta periode 2003-2018

No	Tahun	Pengangguran (Ribu Jiwa)
1	2003	143.89
2	2004	113.56
3	2005	93.50
4	2006	117.02
5	2007	115.20
6	2008	107.33
7	2009	121.04
8	2010	107.14
9	2011	83.48
10	2012	76.81
11	2013	63.17
12	2014	67.41
13	2015	80.24
14	2016	57.03
15	2017	64.01
16	2018	73.35

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

Jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 1.3 diatas. Jumlah pengangguran cenderung mengalami kenaikan dan penurunan di beberapa tahun walaupun tidak secara signifikan. Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2003 sebesar 143.89 ribu jiwa,

sedangkan jumlah pengangguran terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 57.03 ribu jiwa.

Masalah pengangguran dapat menyebabkan efek buruk yang bersifat ekonomi ataupun bersifat sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang ditimbulkan, pemerintah perlu secara terus-menerus mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pengangguran. Perlu adanya berbagai kebijakan dari pemerintah untuk dijalankan dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran.

Intervensi atau campur tangan dari pemerintah didalam perekonomian akan selalu ada. Peranan pemerintah dalam suatu perekonomian adalah sebagai aktor yang melaksanakan tugas serta fungsi daerah. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat disuatu daerah. Salah satu kebijakan dari pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu daerah adalah belanja pemerintah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditujukan untuk manajemen kebutuhan publik. Ketetapan dalam penggunaan belanja pemerintah yang ideal adalah yang dapat memicu aktifitas ekonomi dan mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan publik.

**Tabel 1.4 Jumlah Belanja Pemerintah D.I. Yogyakarta
periode 2003-2018**

No	Tahun	Belanja Pemerintah (Ribu Rp)
1	2003	524.487.355
2	2004	670.712.040
3	2005	768.498.592
4	2006	968.386.066
5	2007	1.067.390.920
6	2008	1.629.069.251
7	2009	1.412.048.985
8	2010	1.394.446.100
9	2011	1.590.785.711
10	2012	2.053.825.959
11	2013	2.509.643.374
12	2014	2.981.068.320
13	2015	3.911.107.930
14	2016	4.270.072.673
15	2017	5.279.617.119
16	2018	5.608.293.291

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah belanja pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan ini merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki

kesejahteraan masyarakat serta ditujukan agar kebijakan belanja pemerintah dapat berkontribusi bagi golongan-golongan miskin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan mengulas lebih dalam mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2003-2018”. Alasan dilakukannya penelitian ini karena pada penelitian sebelumnya dilakukan dilokasi yang berbeda, penelitian ini dilakukan di 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Sleman, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Yogyakarta. Selain itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini, akan dilihat bagaimana pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, variabel Pengangguran dan variabel Belanja Pemerintah di tiap Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018, baik pengujian tiap variabel independen (bebas) maupun keseluruhan variabel independen (bebas) secara simultan atau bersama-sama. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) dan menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?
2. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?
3. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018
2. Mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018
3. Mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018

4. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara simultan atau bersama-sama terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam upaya merancang kebijakan dan program sehubungan dengan masalah pengentasan kemiskinan.
2. Sebagai masukan informasi untuk pemerintah daerah tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah mempengaruhi kemiskinan.
3. Sebagai penerapan ilmu dan wawasan yang didapatkan oleh penulis saat proses perkuliahan.
4. Sebagai sumber dan bahan referensi bagi pengembang ilmu dalam melakukan penelitian pada tahun-tahun berikutnya.